AKADEMIK E-ISSN 2774-8863
Jurnal Mahasiswa Humanis
Vol. 5, No. 2, Mei 2025

Sosiologi Pendidikan: Analisis Konflik Pembangunan Pagar Laut Tangerang Selatan

Amaliyah
Universitas Pamulang, Indomesia
dosen01610@unpam.ac.id

Submitted: 17th February 2025 | **Edited**: 28th April 2025 | **Issued**: 01st May 2025

Cited on: Amaliyah, A. (2025). Sosiologi Pendidikan: Analisis Konflik Pembangunan Pagar Laut Tangerang Selatan. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 5*(2), 730-745.

ABSTRACT

The construction of the sea fence in South Tangerang has become a national issue, with the 30.16 km fence lacking clear accountability. This phenomenon is also observed in other regions, such as Kamal Muara in North Jakarta, Batam, Sidoarjo, Surabaya, and Bekasi. The sea fence case has the potential to erode public trust in the government's ability to enforce law and deliver justice. This research aims to identify the conflicts between the community and the government in the construction of the sea fence in South Tangerang and to explore effective strategies for managing these conflicts. The study employs a qualitative library research method, which involves reviewing and analyzing existing literature, documents, reports, and other secondary sources relevant to the case. By synthesizing various viewpoints and theoretical frameworks, the research uncovers the internal and external factors, as well as political influences, that contribute to the conflict. The findings suggest that the conflict arises from a combination of communication barriers, lack of public participation, and an imbalance of power between the government and the local community. The study identifies strategies for managing the conflict, including improving communication and public participation in the development process, and ensuring that both governmental and public interests are balanced through principles of justice, transparency, flexibility, and inclusiveness. Additionally, the research proposes solutions to address the sea fence issue, focusing on legal aspects, transparency in information dissemination, and the recommendation for continuous social education and collaboration among academics, government, NGOs, businesses, and the public.

Keywords: Sea Fence, Conflict Management, Public Participation, Government Accountability**,** Legal Framework

PENDAHULUAN

Polemik pagar laut setinggi 6 meter sepanjang 30.16 KM dari desa muncung hingga desa pakuhaji, Tangerang, Banten, masih menjadi perdebatan di kalangan elit politik dan Masyarakat, dikarenakan identitas dari pemilik pagar laut belum jelas. Menurut Menteri kelautan dan perikanan Sakti wahyu trenggona, bahwa pagar laut tidak dibongkar sebagai proses penyelidikan, untuk kepastian siapa pihak yang bertanggung jawab dalam Pembangunan tersebut. (Isa Bustomi, 2025).

Polemik pagar laut menyoroti pelanggaran regulasi tata ruang UU No. 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Perdebatan yang bergulir di masyarakat adalah dampak negative dari akses para nelayan. Dan menjadi instrument perampasan ruang yang menjadi ketidakadilan sosial, lingkungan dan ekonomi. Juga ketidaksesuaian dengan kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL). (Galang Geraldy, 2025).

Kasus pagar laut diadukan pertama kali pada bulan September 2024, pada dinas kelautan dan perikanan propinsi Banten. Menurut Nurdin (2025) dari aliansi Gerakan reforma agrarian (AGRA), bahwa aduan tersebut tidak ditindaklanjuti, padahal jelas illegal dan kasat mata. Jaringan rakyat pantura, Sandi Martapraja mengaku yang memasang bilah-bilah bambu tersebut, untuk menahan abrasi dan sebagai mitigasi tsunami. (Tempo, 2025). Dan pagar laut tersebut dibangun dengan dana swadaya masyarakat. Akan tetapi, pada temuan hasil citra satelit bahwa lokasi pagar laut di Tangerang berada di laut, artinya di luar garis Pantai. Dimana pagar laut tidak ada kaitannya dengan abrasi atau sedimentasi alamiah.

Menurut mentri agrarian dan tata ruang (ATR)/ Kepala badan pertanahan nasional (BPN), Nusron wahid bahwa terdapat penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan hak milik tepat di Lokasi pagar laut, sebanyak 266 SHGB yang cacat prosedur dan material. Dimana secara langsung dan tidak langsung, kepemilikan sahamnya milik PT. Agung Sedayu. Presiden Prabowo merespon polemic dengan memerintahkan TNI AL untuk mencabut pagar laut. (Kompas, 2025). Dan meminta untuk diusut secara tuntas. (Viriya Singgih, 2025).

Regulasi pertanahan dapat memberikan hak tanah di perairan untuk aktivitas seperti Pelabuhan, perhotelan dan aktivitas lain sesuai legalitas kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL). (Bolivia, 2025). Di balik pagar laut yang membentang, belum ada pihak yang bertanggung jawab. Bahkan pemerintah daerah hingga DPRD menyatakan tidak tahu menahu, padahal masalah tersebut berada di wilayah tugasnya (Fika Nurul, 2025).

Kasus yang sama juga terjadi di beberapa daerah. Menurut kementrian kelautan dan perikanan terdapat 196 kasus ruang laut. Diantaranya di perairan Kamal Muara, Jakarta Utara, Batam, Sidoarjo, Surabaya dan Bekasi. (Tempo, 2025). Menurut Trenggono, kasus

tersebut terkait kegiatan bisnis, dari reklamasi pantai, pembangunan resolt, perusakan mangrove, kasus tersebut sepanjang tahun 2021-2024. (Fakta, 2025).

Menurut Subarudin, bahwa pagar laut di Tangerang merusak ekosistem laut pada terumbu karang, lamun sebagai habitat ikan juga rusak, pola arus air juga berubah. Senada menurut Anta Maulana, bahwa pagar laut menimbulkan ocean grabbing atau akuisisi ruang laut. (Yanita, 2025). Sedangkan menurut Thieu Quang dalam Monsoon Wave Transmission at Bamboo Fences Protecting Mangroves in the Lower Mekong Delta di Sciencedirect, bahwa pagar laut digunakan untuk meminimalisir erosi Pantai di Pantai lumpur bakau di wilayah tropis seperti Thailand dan Vietnam.

Menurut Pakar Geospasial Departemen Geodesi Fakultas Teknik UGM, I Made Andi Arsana, berdasarkan aturan internasional atau UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea), bahwa perairan kepulauan di pantai utara Tangerang tidak boleh dimiliki oleh individu atau perusahaan. Proyek infrastruktur dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, diperlukan pendidikan sosial. Di mana tatanan persepsi pendidikan sosial pada Masyarakat dengan pemahaman menggunakan regulasi PERMEN Kelautan dan perikanan No. 28 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang laut. Dan PERMEN Kelautan dan perikanan No. 30 BN 2021/NO. 746, 55 tentang pengawasan ruang laut.

Fenomena kasus pagar laut dapat memicu ketidakpercayaan public pada pemerintah dalam penanganan penegakkan hukum dan keadilan masyarakat. Konflik ini telah menimbulkan berbagai masalah, seperti penolakan masyarakat terhadap pembangunan, demonstrasi, dan tuntutan ganti rugi. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif untuk mengelola konflik ini dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

LANDASAN TEORI

Sosiologi Pendidikan mempelajari interaksi sosial dalam konteks pendidikan dan pengaruhnya terhadap perkembangan masyarakat (Suharto, A. (2018). Dalam konteks pembangunan, sosiologi pendidikan berperan penting dalam memahami dinamika sosial yang timbul akibat kebijakan atau program pembangunan yang tidak hanya mengubah struktur fisik, tetapi juga mempengaruhi relasi sosial, identitas budaya, dan keadilan

social (Satria, A. (2020). Salah satu contoh konkret dalam penerapan sosiologi pendidikan adalah konflik pembangunan Pagar Laut yang terjadi di berbagai daerah pesisir Indonesia. Pagar Laut, yang sering kali dikaitkan dengan upaya perlindungan terhadap pesisir dan pengelolaan sumber daya alam, dapat memunculkan dampak sosial dan pendidikan yang cukup besar bagi masyarakat lokal. Pembangunan ini seringkali berhadapan dengan masalah-masalah sosial seperti penggusuran, ketidakadilan ekonomi, dan ketimpangan akses terhadap pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat yang terkena dampak.

Secara teoritis, teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx relevan untuk memahami pembangunan Pagar Laut. Dalam perspektif ini, pembangunan tersebut bisa dilihat sebagai bentuk pertarungan antara kelompok pemodal dan masyarakat local (Nugroho, 2020). Pembangunan yang didorong oleh kepentingan kapitalisme sering kali mengabaikan hak-hak masyarakat lokal yang lebih mengutamakan kelangsungan hidup dan kesejahteraan mereka. Konflik yang muncul bukan hanya masalah pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga ketidakadilan dalam distribusi manfaat pembangunan. Masyarakat yang paling rentan seringkali menjadi pihak yang dirugikan, sementara pihak-pihak yang memiliki kekuasaan ekonomi dan politik mendapat keuntungan besar. Di sisi lain, teori pendidikan kritis dari Paulo Freire mengingatkan bahwa masyarakat yang terpinggirkan harus diberdayakan melalui pendidikan agar mampu mengkritisi struktur sosial yang tidak adil (Rahman, 2021).

Secara argumentatif, pembangunan Pagar Laut dapat dilihat sebagai contoh ketegangan antara kebutuhan untuk melindungi lingkungan dan hak-hak sosial-ekonomi masyarakat lokal. Dalam banyak kasus, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan pesisir merasa terpinggirkan oleh kebijakan pembangunan yang sering kali tidak melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Sebagai hasilnya, mereka mungkin kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang sebelumnya mereka kelola, tanpa mendapat alternatif yang setara dalam hal pendidikan atau peningkatan kualitas hidup. Penelitian oleh Evers dan Seitz (2019) menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan yang tidak sensitif terhadap dinamika sosial dan lokal justru memperburuk ketimpangan sosial dan menghambat pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya ketidakadilan sosial ini, pendidikan menjadi alat yang sangat penting untuk mengubah pandangan dan memberi kesadaran kepada masyarakat agar mereka dapat memperjuangkan hak mereka dalam proses pembangunan.

Faktanya, banyak studi yang mengungkapkan bahwa pembangunan tanpa partisipasi masyarakat lokal cenderung menciptakan resistensi dan ketidakpuasan. Penelitian oleh Jannah (2020) mengenai konflik pembangunan Pagar Laut di pesisir pantai Sumatra, misalnya, menemukan bahwa masyarakat yang terdampak pembangunan merasa terasingkan dan kehilangan identitas budaya mereka. Selain itu, mereka juga tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan yang relevan dengan perubahan ekonomi yang dihadirkan oleh pembangunan tersebut. Hal ini menciptakan kesenjangan pendidikan dan sosial yang semakin lebar, di mana kelompok masyarakat yang sudah terpinggirkan semakin sulit untuk beradaptasi dengan perkembangan yang ada. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan pendidikan dalam setiap kebijakan pembangunan untuk memastikan keberlanjutan sosial dan ekonomi masyarakat lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research), yang menghasilkan data berupa kata-kata atau gambar. Karakteristik utama penelitian kualitatif library adalah pengumpulan informasi dan data melalui berbagai media yang tersedia, seperti berita, buku, dan penelitian terdahulu, dengan menggunakan landasan teori yang jelas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi konflik yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah terkait pembangunan Pagar Laut di Tangerang Selatan, menganalisis penyebab dan dampak dari konflik tersebut, serta mengidentifikasi strategi yang efektif untuk mengelola konflik tersebut.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama adalah pengumpulan data mengenai permasalahan Pagar Laut di Tangerang Selatan dari berbagai media, seperti berita, dokumen, dan penelitian terdahulu. Pada tahap kedua, data yang terkumpul akan diklasifikasikan untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan analisis. Selanjutnya, pada tahap ketiga, dilakukan analisis data melalui tema, konten, dan narasi. Tahap terakhir adalah validasi data, yang bertujuan memastikan akurasi data dengan prosedur sistematis dan menjaga konfirmabilitas hasil temuan, yang dapat diverifikasi oleh peneliti lain. Dengan desain penelitian kualitatif ini, diharapkan peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai

konflik antara masyarakat dan pemerintah, serta menemukan strategi yang efektif dalam mengelola konflik tersebut.

HASIL PENELITIAN

Bagaimana konflik antara masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan pagar laut Tangerang Selatan terjadi dan berkembang?

Polemik mengenai munculnya pagar laut di Tangerang masih berlanjut. Zaki, mantan Bupati Tangerang, menyebutkan bahwa pagar laut sudah ada sejak 2014, melihat kondisi pantura yang rusak. Muannas, konsultan hukum Agung Sedayu Group, menjelaskan bahwa lahan di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, yang terabrasi, sebelumnya adalah tambak dan sawah dengan status SHBG, yang kemudian dipagari oleh masyarakat. Lahan tersebut memiliki SHGB dan SHM berdasarkan surat girik tahun 1982 dan terdaftar pada 2023 melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (Ignatia, 2025). Sementara itu, Surwan, warga setempat, mengatakan bahwa pagar laut muncul sekitar 3-4 bulan lalu pada malam hari tanpa keterlibatan warga, diawali dengan lima truk yang membawa bambu untuk dipasang di pesisir Pulau Cangking (CNN Indonesia, 2025).

Kasus pengurukan pantai di Merak dan sepanjang pesisir Anyer hingga Teluk Naga diungkapkan oleh Edison (DPR RI Komisi VIII), yang menyebut bahwa daerah tersebut dulu adalah rawa dan mangrove, kemudian dilakukan sertifikasi, pemasangan pagar, dan pengurukan lahan oleh mafia tanah dan sertifikat ilegal. Pangeran Khairul Saleh dari Komisi XIII DPR menilai pembangunan pagar laut melanggar hak asasi manusia (HAM), karena merampas kedaulatan rakyat, merusak lingkungan, dan membatasi akses masyarakat terhadap sumber daya laut. Pembangunan pagar laut ini juga mengganggu aktivitas nelayan, meskipun ada protes, pemasangannya terus dilakukan. Diduga, pembangunan pagar laut ini terkait dengan proyek PIK 2, mengingat seringnya pertemuan antara pengembang PT. Agung Sedayu Group dan pejabat setempat, yang memicu perselisihan dengan masyarakat, termasuk pimpinan serikat nelayan dan kepala desa (Samrut, 2025; Dewi Agustina, 2025).

Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi konflik antara masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan pagar laut Tangerang Selatan?

Pagar laut di Tangerang Selatan cerminan dari persoalan besar yang melibatkan regulasi, akumulasi kekayaan, marginalisasi komunitas pesisir. Di samping itu, dari klaim

kepemilikan, dampak sosial ekologis, menjadi potret konflik multidimensi antara kepentingan modal, Masyarakat lokal dan negara. (Sry Lestari, 2025). Faktor-faktor yang mempengaruhi konflik antara masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan pagar laut Tangerang Selatan dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

Faktor Internal

1. Kurangnya Komunikasi. Kurangnya komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat tentang rencana pembangunan pagar laut.
2. Kurangnya Partisipasi. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan tentang pembangunan pagar laut.
3. Perbedaan Kepentingan: Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat tentang tujuan dan manfaat pembangunan pagar laut.

Faktor Eksternal

1. Faktor Ekonomi. Faktor ekonomi seperti biaya pembangunan, dampak pada pendapatan masyarakat, dan potensi kerugian bagi bisnis lokal.
2. Faktor Lingkungan. Faktor lingkungan seperti dampak pada ekosistem laut, kerusakan habitat, dan potensi polusi.
3. Faktor Sosial. Faktor sosial seperti dampak pada kehidupan masyarakat, perubahan budaya, dan potensi konflik dengan masyarakat lain.

Faktor Politik

1. Kebijakan Pemerintah. Kebijakan pemerintah tentang pembangunan pagar laut dan dampaknya pada masyarakat.
2. Peran Pemerintah. Peran pemerintah dalam mengelola konflik dan menyelesaikan masalah yang timbul.
3. Pengaruh Politik. Pengaruh politik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembangunan pagar laut.

Faktor Lainnya

1. Faktor Teknis. Faktor teknis seperti desain dan konstruksi pagar laut, serta dampaknya pada lingkungan.
2. Faktor Hukum. Faktor hukum seperti peraturan dan undang-undang yang mengatur pembangunan pagar laut.
3. Faktor Budaya. Faktor budaya seperti nilai-nilai dan kepercayaan masyarakat yang berhubungan dengan pembangunan pagar laut.

Fakta pembangunan pagar laut di Tangerang menunjukkan kurangnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta tidak adanya pihak yang bertanggung jawab atas pemasangannya. Pembangunan pagar laut dimulai sejak 2020 dengan tujuan melindungi wilayah pesisir dari perubahan iklim dan untuk keberlanjutan sumber daya alam, yang diprakarsai oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan guna menjaga kedaulatan pesisir. Namun, kasus ini mengungkapkan kelemahan komunikasi publik di Indonesia, di mana metode top-down yang tidak relevan digunakan dalam pengambilan keputusan, menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Teori transparansi komunikasi (Kowalski et al., 2022) menjelaskan bahwa keterbukaan informasi terdiri dari tiga komponen utama, yaitu keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi, yang seharusnya diterapkan dalam kasus ini.

Masalah lain yang menonjol dalam pembangunan pagar laut adalah komunikasi yang buruk antar lembaga pemerintah, seperti dalam kasus pembongkaran pagar laut oleh TNI tanpa melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Menurut teori jaringan komunikasi (Borge, 2020), keberhasilan organisasi sangat bergantung pada struktur komunikasi yang efektif, dan tanpa koordinasi yang baik, antar lembaga menjadi tidak kompak. Selain itu, kurangnya pemanfaatan teknologi digital juga menjadi faktor penting, karena teknologi dapat meningkatkan transparansi informasi. Dengan menggunakan platform digital, pemerintah dapat menjelaskan tujuan, keuntungan, dan konsekuensi kebijakan, yang akan berdampak positif pada kepercayaan masyarakat serta mencegah spekulasi negatif (Hari, 2025).

Bagaimana strategi pengelolaan konflik yang efektif dapat diterapkan untuk menyelesaikan konflik antara masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan pagar laut Tangerang Selatan?

Penyelesaian pagar laut akan dikaji secara menyeluruh terutama dalam kajiansosial dan lingkungan hidup. Hanif (Menteri lingkungan hidup), mengatakan bahwa pemasangan pagar laut tidak mendapat persetujuan dari AMDAL. Dan segera akan mengambil langkah konkret dari hasil forensik pagar laut. (Merdeka.com, 2025).

Pengelolaan konflik dapat dilakukan dengan pendidikan sosial. Yaitu Pendidikan bagi masyarakat pesisir mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan pesisir, terutama dalam menghadapi perubahan iklim. Fakta pemasangan pagar laut juga dapat memberi dampak positif antara lain: (Melina, 2025).

1. Penguatan ekosistem pesisir. Pagar laut berfungsi sebagai penghalang fisik dan juga dalam upaya untuk melestarikan terumbu karang dan hutan mangrove. Artinya pagar laut digunakan untuk melindungi Kawasan pesisir dari ancaman abrasi dan memperbaiki ekosistem.
2. Dukungan terhadap komunitas pesisir. Pagar laut dapat meminimalisir bencana alam dan memberikan rasa aman pada masyarakat sekitar kawasan pesisir yang rentan.
3. Proyek berskala nasional. Proyek pagar laut harus melibatkan banyak pihak mulai dari pemerintah hingga masyarakat local dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur tersebut.
4. Pembangunan berkelanjutan. Bahwa pagar laut dirancang dengan memperhatikan prinsip ekologi untuk mengurangi dampak negative terhadap lingkungan sekitar dan untuk persiapan masa depan.

Strategi sebagai suatu rangkaian kegiatan dengan memperhatikan metode terhadap seluruh aspek tujuan strategis organisasi dan sumber daya manusia. Keberlanjutan dalam kinerja memerlukan manajemen konflik untuk peningkatan hubungan interpersonal terkait penyelesaian program. (Della, 2023). Berikut beberapa strategi pengelolaan konflik yang efektif untuk menyelesaikan konflik antara masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan pagar laut Tangerang Selatan:

1. Komunikasi yang Efektif. Pastikan komunikasi yang terbuka, jujur, dan transparan antara pemerintah dan masyarakat.
2. Mediasi. Gunakan mediasi sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik dengan bantuan pihak ketiga yang netral.
3. Partisipasi Masyarakat. Libatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan tentang pembangunan pagar laut.
4. Pengelolaan Emosi. Kelola emosi dan stres yang timbul selama konflik dengan menggunakan teknik manajemen stres dan emosi.
5. Pencarian Solusi Bersama. Cari solusi bersama yang memenuhi kepentingan dan kebutuhan baik pemerintah maupun masyarakat.
6. Pengembangan Kemitraan. Kembangkan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kerja sama dan membangun kepercayaan.

7. Penggunaan Teknologi. Gunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan konflik.
8. Pengembangan Kapasitas. Kembangkan kapasitas pemerintah dan masyarakat untuk mengelola konflik dengan efektif.

Untuk menangani konflik diperlukan manajemen konflik yang sesuai dengan shared values. Karena tentu penyebab konflik yang variative dan bentuk konflik yang berbeda. Manajemen konflik sebagai Upaya untuk merangsang, mengurangi serta menyelesaikan konflik untuk menyamakan persepsi dan tujuan. Oleh karena itu, perlu diperhatikan prinsip dalam pengelolaan konflik. Adapun prinsip pengelolaan konflik yaitu :

1. Prinsip Keadilan. Pastikan bahwa solusi yang ditemukan adil dan tidak memihak salah satu pihak.
2. Prinsip Transparansi. Pastikan bahwa proses pengelolaan konflik transparan dan dapat dipantau oleh semua pihak.
3. Prinsip Partisipasi. Pastikan bahwa semua pihak yang terkait memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan konflik.
4. Prinsip Fleksibilitas. Pastikan bahwa solusi yang ditemukan fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan semua pihak.

Pembangunan pagar laut di Tangerang Selatan menjadi polemik, juga disebabkan prinsip pengelolaan konflik yang tidak dilakukan. Seharusnya dilakukan beberapa tahapan dalam pengelolaan konflik.

Tahap Awal Konflik

1. Perencanaan Pembangunan. Pemerintah merencanakan pembangunan pagar laut di Tangerang Selatan untuk melindungi pantai dari abrasi dan meningkatkan keamanan.
2. Kurangnya Komunikasi. Pemerintah tidak melakukan komunikasi yang efektif dengan masyarakat tentang rencana pembangunan, sehingga masyarakat tidak memahami tujuan dan manfaat pembangunan.
3. Kekhawatiran Masyarakat. Masyarakat mulai khawatir tentang dampak pembangunan terhadap lingkungan, ekonomi, dan kehidupan mereka.

Tahap Eskalasi Konflik

1. Protes dan Demonstrasi. Masyarakat melakukan protes dan demonstrasi untuk menentang pembangunan pagar laut.

2. Penggunaan Media Sosial. Masyarakat menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang konflik dan meminta dukungan dari masyarakat lain.
3. Pertemuan dengan Pemerintah. Masyarakat melakukan pertemuan dengan pemerintah untuk menyelesaikan konflik, namun pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan.

Tahap Intensifikasi Konflik

1. Penggunaan Kekerasan. Konflik mulai berubah menjadi kekerasan, dengan masyarakat melakukan aksi blokade dan pemerintah melakukan penangkapan.
2. Penglibatan Pihak Ketiga. Pihak ketiga, seperti organisasi lingkungan dan LSM, mulai terlibat dalam konflik untuk mendukung masyarakat.
3. Pengaruh terhadap Ekonomi. Konflik mulai berdampak pada ekonomi lokal, dengan penurunan pendapatan dan kerugian bagi bisnis.

Tahap Penyelesaian Konflik

1. Mediasi. Pemerintah dan masyarakat melakukan mediasi untuk menyelesaikan konflik.
2. Kesepakatan. Pemerintah dan masyarakat mencapai kesepakatan tentang pembangunan pagar laut, dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
3. Implementasi. Pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk mengimplementasikan kesepakatan dan menyelesaikan konflik.

Bagaimana peran pemerintah dan masyarakat dalam mengelola konflik dan mencapai solusi yang berkelanjutan dalam pembangunan pagar laut Tangerang Selatan?

Polemik pagar laut di Tangerang memerlukan solusi berkelanjutan, karena pembangunan tanpa prosedur regulasi telah berdampak langsung pada mata pencaharian ribuan keluarga pesisir akibat penutupan akses tangkap ikan. Solusi yang diusulkan melibatkan peran pemerintah dan masyarakat. Pertama, penyelesaian kasus ini harus difokuskan pada aspek hukum, dengan pemahaman yang tepat tentang regulasi, terutama dalam hal pertanahan, tata ruang, dan perlindungan nelayan. Menurut Ricardo, pakar hukum agraria UGM, masalah ini terkait dengan izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL), yang perlu diklarifikasi apakah kegiatan tersebut legal atau ilegal. Mahfudz MD, guru besar UII, menilai kasus ini harus digolongkan sebagai tindak pidana

karena dampaknya yang merugikan, seperti penyerobotan alam, sertifikat ilegal, dan indikasi korupsi. Agus Harimurti, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, menyatakan bahwa sertifikat SHGB dan SHM untuk kawasan pagar laut Tangerang telah diterbitkan pada 2023 di era kepemimpinan Jokowi, namun Jokowi meminta agar proses legal sertifikat tersebut diperiksa secara menyeluruh (Irawan, 2025).

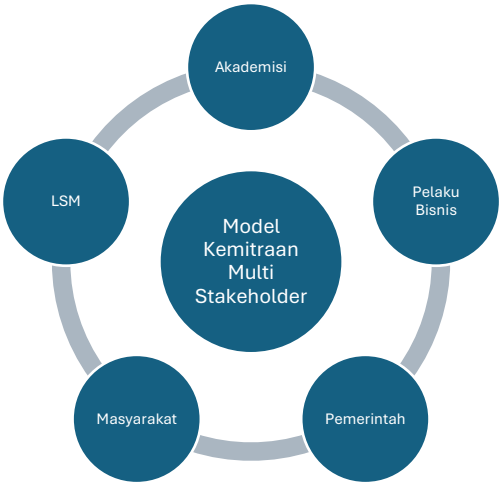
Pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan pagar laut ini dapat dijerat dengan berbagai pasal hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap kegiatan di wilayah pesisir harus memiliki izin pemanfaatan ruang laut (KKPRL), dan pelanggaran terhadap aturan ini dapat mengakibatkan sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda maksimal Rp10 miliar. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha tanpa izin lingkungan dapat dikenakan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda maksimal Rp3 miliar. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 192 juga mengatur bahwa setiap orang yang menghalangi akses umum dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 9 tahun. Terakhir, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Laut memberikan kewenangan untuk memberikan sanksi administratif hingga pidana terhadap pelanggaran tata ruang laut.

Pada Agustus 2024, laporan terkait pembangunan pagar laut yang diduga melibatkan pihak-pihak yang melindungi pelaku mengungkapkan bahwa KKP tidak mengambil tindakan tegas untuk menghentikan atau menyelidiki proyek tersebut. ORMAS, yang terlibat, tidak memiliki kapasitas untuk memagari laut karena membutuhkan biaya, tenaga kerja terorganisir, dan logistik besar, yang menunjukkan adanya perencanaan teknis matang dan pendanaan besar. Selain itu, terdapat indikasi keterlibatan investor besar dengan pemagaran yang sistematis di Tangerang dan Bekasi. Presiden Prabowo meminta jajaran menteri untuk bertindak tegas, mengungkap aktor di balik proyek, dan menginvestigasi potensi keterlibatan investor besar. Pemagaran laut ini bukan hanya masalah hukum, tetapi juga keadilan sosial, sehingga KKP harus melindungi hak nelayan tradisional dan menegakkan hukum dengan dukungan penuh dari pemerintah dan lembaga terkait.

E-ISSN 2774-8863

Peran pemerintah dalam pembangunan pagar laut Tangerang Selatan sangat penting untuk mencapai solusi yang berkelanjutan. Pemerintah harus mengatur dan mengawasi proyek ini agar sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta mengelola konflik yang timbul dengan cara efektif dan transparan, seperti melalui mediasi atau negosiasi. Selain itu, pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung pembangunan pagar laut yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta mengalokasikan sumber daya yang cukup, seperti anggaran, tenaga kerja, dan teknologi, untuk mendukung pelaksanaan proyek tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam kebijakan pemerintah memberikan manfaat konkret, seperti legitimasi kebijakan, pengetahuan lokal yang mendalam, dan peningkatan akuntabilitas, yang membuat kebijakan lebih mencerminkan kebutuhan masyarakat. Peran masyarakat dalam pembangunan pagar laut meliputi: pertama, mengawasi dan mengkritik proyek agar sesuai dengan peraturan yang berlaku; kedua, mengembangkan kesadaran tentang pentingnya pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan; ketiga, terlibat dalam proses pengambilan keputusan melalui musyawarah atau diskusi; dan keempat, mengembangkan kapasitas untuk mengelola dan memelihara pagar laut melalui pelatihan atau pendidikan. Kolaborasi dalam strategi pencegahan konflik dapat dilakukan dengan model kemitraan multi-stakeholder untuk mencapai solusi yang berkelanjutan (Kanti, 2020).



Kolaborasi antara komponen-komponen akademik, LSM, pelaku bisnis, masyarakat, dan pemerintah memiliki potensi besar dalam menciptakan pendidikan sosial di masyarakat. Akademisi memberikan modal pengetahuan dan keahlian untuk program dan pemberdayaan masyarakat, sementara pelaku bisnis, yang tidak hanya berfokus pada

keuntungan, turut memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, seperti melalui alokasi pendanaan Corporate Social Responsibility (CSR). Pemerintah berperan dalam mengkomunikasikan regulasi kepada masyarakat, melibatkan pembuat kebijakan, pelaksana fungsi stimulasi, serta menyediakan sumber pembiayaan infrastruktur dan teknologi. LSM juga memiliki peran penting dalam mengembangkan potensi kawasan pesisir, mendampingi masyarakat, dan menyediakan sumber pembiayaan alternatif. Masyarakat sebagai aktor kunci dapat mempercepat keberhasilan program ini.

Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat harus mencakup empat aspek utama: pertama, mengembangkan kemitraan yang kuat untuk mendukung pembangunan pagar laut yang berkelanjutan dan ramah lingkungan; kedua, mengadakan komunikasi yang efektif untuk memastikan bahwa kepentingan semua pihak terpenuhi; ketiga, mengembangkan rencana terintegrasi yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan; dan keempat, mengalokasikan sumber daya yang cukup, seperti anggaran, tenaga kerja, dan teknologi, untuk mendukung keberhasilan proyek pagar laut (Irawan, 2025).

KESIMPULAN

Pagar laut di wilayah Tangerang sejauh 30 km tidak sesuai dengan tata ruang dan zonasi dari pesisir dan laut propinsi Banren. Klaim terkait lahan tambak dan sawah sebagai tanah tenggelam sebelumnya, terbantahkan pada data citra satelit yang menunjukkan bahwa area tersebut sejak dulu bagian dari perairan.

Pembangunan pagar laut di Tangerang menimnulkan konflik antara Masyarakat dan pemerintah. Bahwa Masyarakat merasakan pagar laut merusak lingkungan dan menganggu kehidupan mereka. Di sisi lain, terdapat pendapat bahwa pagar laut sebagai Upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Masalah inti pada pagar laut di Tangerang bukan proyek pemerintah, akan tetapi pihak yang tidak berkomunikasi dan berkoordinasi terhadap peruntukkannya.

Pemberian HGB atas tanah di perairan sudah diatur dalam regulasi pertanahan. Akan tetapi regulasi di sektor kelautan secara jelas izin dan larangan belum diatur. Hal tersebut menimbulkan keraguan legalitas Pembangunan pagar laut di Tangerang Selatan. Konflik tersebut disebabkan ketidaksinkronan regulasi antara hukum pertanahan dan

 E-ISSN 2774-8863

perairan. Pendidikan sosial terkait dengan pagar laut dan regulasi kelautan pada Masyarakat menjadi hal yang harus dilakukan dengan pemahaman pelestarian ekosistem yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Bolivia. (2025). Kasus Pagar Laut Bersertifikat HGB, Pakar Agraria UGM Nilai Ada Ketidaksinkronan Regulasi dan Kepatuhan Hukum, https://ugm.ac.id/id/berita/kasus-pagar-laut-bersertifikat/ 2025.

Borge, R. (2020). *Communication Networks and Organizational Success: A Contemporary Approach*. Journal of Organizational Communication, 38(1), 45-58.

CNNIndonesia. (2025). Nusron Ungkap Asal-usul Pagar Laut Tangerang Punya SHGB dan SHM, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2025.

Della Mudmahillah Tul. (2023). Strategi dan Pedekatan dalam Mengelola Konflik, Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi, Vol. 1, No. 1.

Dewi Agustina. (2025). Warga Cerita Awal Mula Munculnya Pagar Laut di Tangerang, 5 Truk Bawa Bambu, Dibangun Tengah Malam, https://www.tribunnews.com/metropolitan/2025.

Evers, H. D., & Seitz, T. (2019). *Social Inequality and Development: Theories and Evidence*. Journal of Development Studies, 45(3), 278-295.

Fika Nurul, Kompasnews, (2025). Misteri Pagar Laut di Tangerang: Potret Ketidakjujuran di Negeri Ini?, https://nasional.kompas.com/read/2025.

Galang Geraldy, (2025). pagar laut dan konflik perebutan ruang, Detiknews, https://news.detik.com/kolom/d-7744798/pagar-laut-dan-konflik-perebutan-ruang 2025.

Hari, (2025). Salah komunikasi dibalik polemic pagar laut Tangerang, https://umj.ac.id/opini/salah-komunikasi-di-balik-polemik-pagar-laut-tangerang.

Ignatia, Tribunjatim, (2025). Sejarah Munculnya Pagar Laut di Tangerang, Ada Sejak 2014, Benarkah Hasil Swadaya Warga Pesisir? https://jatim.tribunnews.com/2025.

Irawan Sapto, (2025). Bagaimana Cara Menyelesaikan Kasus Pagar Laut Tangerang?, https://www.kompas.com/tren/read/2025.

Jannah, S. (2020). *Konflik Sosial dalam Pembangunan Pagar Laut di Pesisir Sumatra*. Jurnal Sosiologi Pendidikan, 12(2), 45-58.

Kanti Suraningsih, (2020). Peran Masyarakat dalam Konservasi Ekosistem Mangrove Daerah Pesisir Kabupaten Bantul, https://mil.pasca.undip.ac.id/wp-content/uploads/2021/11/9.-Kanti-Suraningsih-59-68.pdf, 2020.

Kompas, (2025). Walhi Dorong Menteri ATR Pidanakan 6 Pegawai yang Dicopot terkait Pagar Laut: Ini Persoalan Besar, https://www.kompas.tv/nasional/2025.

Kowalski, D., Miller, P., & Lee, R. (2022). *Transparency in Public Communication: Building Trust and Engagement in Governmental Decision Making*. Journal of Public Relations and Communication, 45(3), 112-130.

 E-ISSN 2774-8863

Melina Aryanti, (2025). Ini Sejarah, Fakta-fakta Pemasangan Pagar Laut 30 KM, https://rri.co.id/nasional/ini-sejarah-fakta-fakta-pemasangan-pagar-laut-30-km, 2025.

Merdeka.com, (2025). Strategi Pemerintah Tangani Pagar Laut Tangerang: Kumpulkan Informasi Lewat Media Online dan Cetak, https://www.merdeka.com/uang/strategi-pemerintah-tangani-pagar-laut-tangerang-mvk.html?page=2, 2025.

Muhammad Isa Bustomi, (2025). Polemik Pagar Laut di Tangerang, Apa Tujuan Sebenarnya?Kompas https://megapolitan.kompas.com/read/2025

Muyazzin, Fakta, Cerita 169 Pagar Laut di Berbagai Wilayah RI, Diduga Awal Mula Properti, https://fakta.com/nasional/cerita-pagar-laut-di-berbagai-wilayah-ri, 2025.

Nihlah Nafa'ani, (2023). Model Pengelolaan Konflik Dan Penerapannya Dalam Meningkatkan Kualitas Lembaga Pendidikan, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1, No. 2, 2023.

Nugroho, A. (2020). *The Impact of Capitalist-driven Development on Local Communities: A Conflict Perspective*. Journal of Social Issues, 35(2), 145-160.

Nurdin, BBC News, (2025). Pagar laut: 'Semua lembaga sebenarnya sudah tahu, tapi semuanya diam' –Adakah yang akan dijerat secara hukum? https://www.bbc.com/indonesia/articles/czxknllxly6o 2025.

Rahman, F. (2021). *Critical Education and Social Change: Empowering Marginalized Communities through Education*. International Journal of Education and Development, 29(1), 25-39.

Samrut Lellolsima, (2025). Pagar Laut Tangerang Merampas Kedaulatan Rakyat, https://www.jurnas.com/Pagar-Laut-Tangerang-Merampas-Kedaulatan-Rakyat/, 2025.

Satria, A. (2020). *Konflik Sosial dalam Pembangunan Pagar Laut di Pesisir Indonesia*. Jurnal Pembangunan Sosial, 14(2), 87-102.

Sry Lestari samosir, (2025). Pagar Laut Tangerang: Konflik Kuasa, Modal, dan Keberlanjutan Ekosistem, Kompas.com, https://www.kompas.com/tren/read/2025.

Suharto, A. (2018). *Sosiologi Pendidikan dalam Konteks Pembangunan Sosial*. Jurnal Sosiologi, 10(1), 123-135.

Tempo news, (2025). Kasus Pagar Laut Tangerang: 18 Km Dibongkar, SHGB Agung Sedayu Dibatalkan, Masuk KPK, dan Alasan DPR Tak Bentuk Pansus, https://www.tempo.co/ekonomi/kasus-pagar-laut-tangerang-2025.

Thieu Quang, Monsoon Wave Transmission at Bamboo Fences Protecting Mangroves in the Lower Mekong Delta di Sciencedirect, tth.

Viriya Singgih, (2025). BBCnews, Jejak Aguan dan Agung Sedayu di balik sertifikat HGB kawasan pagar laut Tangerang – 'Presiden minta ini diusut tuntas', https://www.bbc.com/indonesia/articles/ckg0zg80kxjo , 2025.

Yanita, (2025). BRIN Ungkap Kerusakan yang Timbul Akibat Pagar Laut, https://hijau.bisnis.com/read/2025.